

## **Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis Web Desa Tilote**

Yulia Puspitasari Gobel

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia; yuliapuspitasarigobel@iaingorontalo.ac.id

---

### **ARTICLE INFO**

*Article history:*

Received 2023-01-15

Revised 2023-01-20

Accepted 2023-01-30

---

---

### **ABSTRAK**

Pemerintah sebagai pemangku jabatan diharapkan dapat mengarahkan seluruh kinerjanya agar menjadi pemerintahan yang baik (Good Government) yaitu pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, akuntabilitas dan transparansi. Untuk mewujudkan hal itu maka dibutuhkan pemerintahan desa yang mampu mempertanggung jawabkan seluruh aktifitas yang ada di Desa. Awalnya laporan keuangan Desa Tilote menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Daerah) tetapi sejak tahun 2016 Desa tidak menggunakan system aplikasi SIMDA, karena Penyusunan Laporan dengan Sistem telah dialihkan di kecamatan Tilango, padahal setiap periode Desa harus melaporkan seluruh pendapatan dan belanja di kecamatan secara berkala, sehingga untuk pelaporan keuangan pihak Desa menggunakan sistem manual. sehingga sangat diragukan jika pelaporan keuangan dapat dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Permasalahan tersebut menjadi perhatian utama yang membutuhkan solusi sehingga harapan aparat pemerintah Desa dalam mewujudkan program nasional *good government* dapat terwujud. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian Masyarakat oleh dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo menawarkan sebuah kerja sama dengan mitra yakni Desa Tilote Kecamatan Tilango dalam mewujudkan harapan pihak aparat Desa tersebut melalui Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa berbasis WEB dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Kegiatan pelatihan system informasi akuntansi Keuangan berbasis WEB kepada aparat desa dapat mewujudkan pelaporan keuangan Desa yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: *Sistem, Keuangan, Desa*

---

### **ABSTRACT**

*The government as the office holder is expected to be able to direct all of its performance to become a good government, namely a clean government free from corruption, accountability and transparency. To realize this, a village government is needed that is able to account for all activities in the village. Initially, Tilote Village financial reports used SIMDA (Regional Information System) but since 2016 the Village has not used the SIMDA application system, because Reporting with the System has been transferred to Tilango sub-district, even though every village period must report all income and expenditures in the*

---

---

*sub-district periodically, so that for village financial reporting using a manual system. so it is very doubtful if financial reporting can be reported accurately and on time. This problem is a major concern that requires a solution so that the hopes of village government officials in realizing the national good government program can be realized. Therefore, through community service activities by IAIN Sultan Amai Gorontalo lecturers, they offer a collaboration with partners, namely Tilote Village, Tilango District in realizing the expectations of the Village apparatus through WEB-based Village Financial Accounting Information System Training in realizing good governance and free from corruption. WEB-based financial accounting information system training activities for village officials can realize village financial reporting that is accurate, reliable, timely, and accountable*

**Keyword:** System, Finance, Village

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*




---

**Corresponding Author:**

Yulia Puspitasari Gobel

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia; yuliapuspitasarigobel@iaingorontalo.ac.id

---

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa yang merupakan wilayah kerja Kepala Desa sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat Dalam hal pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Sulumin, 2015), Dalam rangka meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien (Yulia Puspitasari Gobel & Dukalang, 2018). Berdasarkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Desa Menteri Dalam Negeri dalam Bab II Pasal 2 bahwa pemerintahan Desa menyusun Administrasi Keuangan yang merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan Desa (Purbowati & Astutik, 2017) .

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula (Tenriwaru & Nurwanah, 2022). Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya (Sangki, Gosal, & Kairupan, 2017), dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Sucahyo, 2019). Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 (RI, 2016) yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 (Indonesia, 2014) tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas, Hal ini merupakan salah satu aspek penting yang mampu mewujudkan *Good*

*Governance* dan paling sering menjadi pembahasan publik adalah akuntabilitas (Wijayanto, 2015).

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP, 2015) menjelaskan akuntabilitas adalah memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Nafidah & Anisa, 2017). Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu system akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Rizal, Fitri, & Rantika, 2018). Setelah diwawancarai aparat desa dan kepala Desa memberikan informasi bahwa awalnya laporan keuangan Desa menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Daerah) tetapi sejak tahun 2016 Desa tidak menggunakan system aplikasi SIMDA, karena Penyusunan Laporan dengan Sistem telah dialihkan di kecamatan Tilango, padahal setiap periode Desa harus melaporkan seluruh pendapatan dan belanja di kecamatan secara berkala, sehingga untuk pelaporan keuangan pihak Desa menggunakan system manual. sehingga sangat diragukan jika pelaporan keuangan dapat dilaporkan secara akurat dan tepat waktu.

Permasalahan tersebut menjadi perhatian utama yang membutuhkan solusi sehingga harapan aparat pemerintah Desa dalam mewujudkan program nasional *good government* dapat terwujud. Oleh karena itu, melalui program Pengabdian Masyarakat Dosen menawarkan sebuah kerja sama dengan mitra yakni Desa Tilote Kecamatan Tilango dalam mewujudkan harapan pihak aparat Desa tersebut melalui Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa berbasis WEB dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Kegiatan pelatihan system informasi akuntansi Keuangan berbasis WEB kepada aparat desa dapat mewujudkan pelaporan keuangan Desa yang yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **Penyelesaian Masalah**

Bertolak dari kondisi tersebut kami dari staf pengajar IAIN Sultan Amai Gorontalo mencoba memberikan kontribusi dalam bentuk Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa Berbasis Web Dalam Mendukung Terwujudnya *Good Government* Bagi Aparat Pemerintahan Desa Tilote Kecamatan Tilango Kab. Gorontalo kami mencoba melakukan transfer ilmu dan keahlian kepada masyarakat Desa Tilote Kecamatan Tilango

### **Metode Tepat Guna**

Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut ialah (1) menggunakan metode pendidikan dan pelatihan tentang penggunaan aplikasi keuangan Desa berbasis WEB sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelola keuangan Desa sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan akan mengundang narasumber yakni Dosen Pengajar Sistem Informasi Akuntansi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo dan peserta dari aparat pemerintah Desa Tilote Kecamatan Tilango. (2) metode pendampingan terhadap aparat Desa Tilote dan Masyarakat untuk mewujudkan

Pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, (3) metode pelayanan melalui aparat pemerintah dalam Pelatihan system Informasi keuangan berbasis WEB.

### **Profil Kelompok Sasaran, Potensi, dan Permasalahannya**

Lokasi Pengabdian Masyarakat ini akan dilaksanakan di Desa Tilote Kecamatan Tilango. Desa Tilote. Desa Tilote adalah salah satu Desa di Kecamatan . Dulunya Desa Tilote ini merupakan hutan belukar saja. Kemudian atas usaha dari seorang perempuan yang bernama Autango bersama seluruh masyarakat hutan belukar ini ditebang. Lama kelamaan hutan belukar ini menjadi suatu dataran yang diapit oleh 3 (tiga) buah gunung/bukit dan sebuah sungai. Oleh karena semakin banyaknya penghuni dataran ini, maka oleh Penduduk atau masyarakat diangkatlah seorang Kepala Kampung. Dimana perempuan Autangolah yang diangkat oleh masyarakat menjadi Kepala Kampung, karena mengingat usaha dan jasa-jasanya.

Adapun perempuan Autango ini berasal dari lorong Tilote yakni sebuah lorong yang terdapat di muka Rumah Sakit Umum Kotamadya Gorontalo di Desa Heledulaa Selatan sekarang. Setelah perempuan Autango ini sudah menjadi Kepala Kampung, sedangkan kampung ini belum mempunyai nama, maka oleh masyarakat kampung ini diberi nama Tilote, yakni nama yang diambil dari lorong Tilote tempat asal dari Autango. Demikianlah nama Tilote ini sampai sekarang sudah resmi menjadi nama Desa, yakni Desa Tilote.

**Tabel 1. Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya**

<b>Kelompok Sasaran</b>	<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>
Aparat Kelurahan Tilote Kecamatan Tilango	Keluarahan Tilote Sempat Menggunakan Sistem Informasi Keuangan SIMDA	Minimnya Pemahaman aparat Desa Tilote kecamatan Tilango tentang penggunaan Sistem Informasi dalam menunjang pelaporan keuangan Desa yang akurat, handal dan dapat dipertanggung jawabkan

### **TARGET DAN LUARAN**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat memiliki target terimplementasinya revolusi mental melalui Pelatihan system informasi keuangan berbasis WEB. Program ini melibatkan Aparat Desa dan Dosen dalam mengaplikasikan ilmu dan keterampilannya untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat melalui pemberdayaan pelatihan dan pendidikan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pelatihan Sistem Informasi akuntansi keuangan, luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatnya kesadaran administrasi keuangan yang baik dan bersih dalam mewujudkan good Government oleh aparat Desa
2. Adanya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Tilote

## 2. METODE

Operasionalisasi Pengabdian Masyarakat ini terdiri atas Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat meliputi tahapan berikut ini:

- a. Penyiapan dan Survei lokasi Pengabdian
- b. Koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan kegiatan Pengabdian Masyarakat
- c. Pelaksanaan Patihan

### Pelaksanaan

“Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa Berbasis Web Dalam Mendukung Terwujudnya *Good Government* Bagi Aparat Pemerintahan Desa Tilote Kecamatan Tilongo Kab Gorontalo” dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

**Tabel 2. Metode Pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat**

No	Permasalahan	Kegiatan
1	Minimnya pengetahuan pengelola Keuangan Desa	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan Desa
2	Penataan administrasi keuangan dari pembukuan kas masuk dan kas keluar	Pendampingan pengelolaan pembukuan dan pencatatan keuangan Desa
3	Kurangnya pemahaman Aparat terkait dengan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Pemerintah yang Handal dan Tepat Waktu	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Desa
4	Kurangnya Pemahaman masyarakat bahwa keuangan Desa perlu akuntabilitas dan transparasi	Sosialisasi pada masyarakat
5	Belum adanya Sistem Akuntansi Keuangan Desa	Pengadaan Sistem Aplikasi Keuangan Desa

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### a. Program Inti

Program utama yang dilaksanakan adalah “Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa Berbasis Web Dalam Mendukung Terwujudnya *Good Government* Bagi Aparat Pemerintahan Desa Tilote Kecamatan Telaga Provinsi Gorontalo.” Sasaran dari program ini adalah Aparat Desa Tilote Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Program kegiatan inti dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yakni persiapan dengan melalui kerja sama antara aparat desa Tilote, pemerintah kabupaten Gorontalo.

Tahap pelaksanaan yang diawali dengan pelatihan yang mengangkat tema “Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa Berbasis Web Dalam Mendukung Terwujudnya *Good Government* Bagi Aparat Pemerintahan Desa Tilote Kecamatan Telaga Provinsi Gorontalo.” Narasumber menyampaikan materi terkait dengan optimalisasi pengelolaan keuangan desa menuju masyarakat yang memiliki Integritas, Etos Kerja, dan gotong Royong sebagai Implementasi Gerakan Revolusi Mental.

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk membentuk aparatur Desa yang memiliki kapabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala Desa Tilote dan dihadiri oleh aparat pemerintah desa yang dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu, tanggal 7 Oktober di Aula Kantor Desa Tilote Kec. Telaga.



**Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi**

Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan gerakan revolusi mental. Kegiatan diskusi melahirkan ide yang cemerlang dari para peserta terutama dalam mewujudkan aparat desa yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa.

#### **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan pelatihan system informasi akuntansi Keuangan berbasis WEB kepada aparat desa dapat mewujudkan pelaporan keuangan Desa yang yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan berjalan dengan lancar karena banyaknya antusias Aparat desa untuk menghadiri pelatihan ini sehingga berdampak pada adanya kesadaran aparat pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas dalam pelayanan pada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan:

1. Pemerintah setempat perlu melakukan peningkatan Pengelolaan Keuangan desa yang efektif dan efisien agar mencapai *Good Governance* pada desa molalahu.

2. perlu adanya pembaharuan terkait perangkat keras, maupun perangkat lunak yang ada didesa agar dapat digunakannya dalam pelayanan prima
3. Desa diharapkan dapat memberikan Sosialisasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran selama setahun sekali agar masyarakat mengetahui alur pemanfaatan dana oleh perangkat desa.

## REFERENSI

- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Indonesia, P. R. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. (2), 1–25.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Purbowati, R., & Astutik, M. (2017). Pelatihan Microsoft Office Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa. *Comvice : Journal of Community Service*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.26533/comvice.v1i1.115>
- RI, K. S. N. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Rizal, Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Al-Iqtishad*, 1(14), 20–37.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Karta Raharja*, 1(1), 33–46.
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di kabupaten Donggala. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1), 43–53.
- Tenriwaru, T., & Nurwanah, A. (2022). Bimtek Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 116. <https://doi.org/10.35906/resona.v5i2.633>
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72–88. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.79>
- Yulia Puspitasari Gobel, & Dukalang, H. (2018). Pelatihan Manajemen Desa Penyusunan SOP Pelayanan Desa Salilama Kecamatan Managgu Kabupaten Boalemo. *Madani*, 1(1), 47–52.